



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN  
MASYARAKAT DESA "APMD"

**NOTA KESEPAHAMAN**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
**DAN**  
**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**  
**TENTANG**  
**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA**  
**DAN PENGEMBANGAN PROGRAM DESA KONSTITUSI**

**Nomor 70/PK/2022**

**Nomor 544/I/U/2022**

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Dua Puluh Lima**, bulan **Agustus**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **M. Guntur Hamzah**, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta 10110, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Sutoro Eko Yunanto**, Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta "APMD", berkedudukan di Jalan Timoho Nomor 317 Yogyakarta 55225, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.



- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan konstitusi guna menegakkan hukum dan keadilan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- c. bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** memandang perlu membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Konstitusi.

Dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
- 4.

**PARA PIHAK** sepakat melakukan kerja sama dalam rangka peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan pengembangan program desa konstitusi sesuai dengan peran, fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut.

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD dan TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman dimaksudkan sebagai acuan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan pengembangan program desa konstitusi;



- (2) Nota Kesepahaman bertujuan untuk dan demi tercapainya peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan pengembangan program desa konstitusi.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara;
- b. Penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- c. Pengkajian ilmiah, forum diskusi, seminar, dan kuliah umum tentang isu-isu aktual Mahkamah Konstitusi, hukum, dan konstitusi;
- d. Pengembangan Jurnal Konstitusi;
- e. Pengembangan Program Desa Konstitusi, dan;
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## **Pasal 3**

### **ORIGINALITAS, VALIDITAS, DAN OTENTISITAS**

**PARA PIHAK** menjamin originalitas, validitas, dan otentisitas dokumen yang telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) yang dilengkapi dengan sertifikat elektronik sebagai dokumen resmi, termasuk dokumen yang dimuat di laman masing-masing.

## **Pasal 4**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala dalam 1 (satu) tahun sekali;
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.



## **Pasal 5**

### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 6**

### **TINDAK LANJUT**

**PARA PIHAK** membuat Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## **Pasal 7**

### **KETENTUAN LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*addendum*).

## **Pasal 8**

### **JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, sampai dengan adanya permintaan tertulis pengakhiran oleh salah satu **PIHAK**.

## **Pasal 9**

### **PENYELESAIAN MASALAH**

Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

## **Pasal 10**

### **PENUTUP**

Penandatanganan secara elektronik (*digital signature*) dilakukan pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di bagian awal Nota



Kesepahaman ini, yang mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad dan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**

**PIHAK KEDUA,**

**M. GUNTUR HAMZAH**

**SUTORO EKO YUNANTO**



*Digital Signature*

Ditandatangani secara elektronik

Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE

